

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah ukuran subjektif yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan dalam konteks bisnis (Mahardika et al. 2025). Secara umum, kinerja keuangan digunakan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan selama periode tertentu, sehingga dapat dipandang sebagai pencapaian sekaligus indikator keberhasilan. Hasil dari kinerja keuangan berfungsi sebagai sinyal prospek di masa depan, misalnya dalam memperoleh tambahan sumber dana maupun memperluas ekspansi ke pasar yang lebih luas.

Menurut Hutabarat (2021) kinerja keuangan ialah teknik analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan memenuhi kegiatan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi serta standar pelaporan keuangan yang ditetapkan. Dengan demikian, kinerja keuangan tidak hanya menilai pencapaian laba, tetapi juga mengukur kepatuhan dan kualitas tata kelola keuangan.

Menurut Rosa et al.,(2024) mengungkapkan bahwasanya kinerja keuangan ialah teknik analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan

menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik, antara lain melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Senada dengan itu, Rahmanda *et al.*, (2024) menekankan bahwasanya kinerja keuangan ialah evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas keuangan perusahaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berlandaskan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan ialah prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu sebagai cerminan tingkat kesehatan finansial sekaligus keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kinerja keuangan juga berperan sebagai indikator prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan instansi di masa depan. Suatu instansi dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan, baik dalam hal pencapaian laba maupun dalam kepatuhan terhadap aturan akuntansi serta pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien.

b. Tujuan Kinerja Keuangan

Hastiwi *et al.*, (2022), tujuan kinerja keuangan ialah untuk mengetahui beberapa aspek utama dalam kondisi perusahaan, yaitu:

- 1) Tingkat likuiditas, yaitu kompetensi instansi dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dilunasi pada saat ditagih.
- 2) Tingkat solvabilitas, yaitu kompetensi instansi dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

- 3) Tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
- 4) Tingkat aktivitas usaha, yaitu kompetensi instansi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara stabil, termasuk membayar beban bunga, hutang pokok, serta membagikan dividen kepada pemegang saham secara tepat waktu dan teratur.

Secara umum, penilaian kinerja memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dengan membantu mereka menyadari dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka mendukung misi perusahaan. Kedua, untuk menyediakan informasi yang berguna bagi karyawan maupun manajer dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja keuangan guna mengetahui perkembangan yang terjadi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan maupun penurunan kinerja tersebut.

c. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu instansi tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan sumber daya finansial semata, tetapi juga berkaitan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berelasi. Faktor-faktor ini memiliki peranan penting dalam menentukan sejauh mana organisasi mampu mencapai efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan dalam operasionalnya. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, organisasi dapat melakukan evaluasi secara lebih komprehensif terhadap kondisi aktual, sekaligus menyusun strategi perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan ialah sebagai berikut (Octavia et al. 2025):

- 1) Pegawai, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, dan kemajuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Pegawai yang kompeten akan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Pekerjaan, yang mencakup desain pekerjaan, uraian tugas, serta ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Kejelasan peran dan tugas akan memudahkan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.
- 3) Mekanisme kerja, yang terdiri atas sistem, prosedur pendelegasian wewenang, mekanisme pengendalian, serta struktur organisasi. Mekanisme kerja yang baik akan menciptakan keteraturan dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 4) Lingkungan kerja, meliputi lokasi dan kondisi kerja, iklim organisasi, serta pola komunikasi. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan motivasi, kenyamanan, serta kinerja pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dengan begitu, dapat ditarik garis besar bahwasanya faktor-faktor tersebut saling terkait dan memberikan keterkaitan yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja yang optimal hanya dapat dicapai apabila pegawai memiliki kompetensi yang memadai, pekerjaan dirancang dengan baik, mekanisme kerja berjalan sesuai prosedur, serta lingkungan kerja mendukung produktivitas. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman atas faktor-faktor tersebut sangat penting untuk

menganalisis kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum instansi Pendidikan dan Pelatihan PPI Madiun, sehingga temuan analisis dapat menyajikan proyeksi yang lebih komprehensif sekaligus rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga tersebut.

d. Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Memah et al., (2023) pengukuran kinerja keuangan ialah proses penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi. Tahapan ini diperlukan agar laporan keuangan tidak hanya menjadi catatan formal, melainkan juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.

Adapun tahapan dalam pengukuran kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Review data laporan

Tahap pertama adalah menelaah data keuangan secara keseluruhan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwasanya laporan keuangan telah disusun dengan jelas, memuat seluruh data yang relevan, serta menggunakan ketentuan akuntansi dan metode penilaian yang tepat. Dengan demikian, analisis dapat memperoleh laporan keuangan yang andal dan dapat diperbandingkan.

2) Menghitung

Pada tahap ini dilakukan berbagai perhitungan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu, seperti metode perbandingan, analisis persentase per komponen, serta analisis rasio keuangan. Pemilihan metode atau teknik yang digunakan sangat bergantung pada tujuan analisis yang ingin dicapai.

3) Membandingkan atau mengukur

Setelah dilakukan perhitungan, langkah selanjutnya adalah membandingkan atau mengukur hasil yang diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan apakah tergolong sangat baik, baik, sedang, kurang baik, atau bahkan buruk.

4) Menginterpretasikan

Interpretasi ialah inti dari proses analisis, yaitu menghubungkan hasil perhitungan dengan teori atau kaidah yang berlaku. Berlandaskan tahapan ini diperoleh proyeksi keberhasilan perusahaan maupun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangannya.

5) Menentukan solusi

Tahap terakhir adalah merumuskan solusi. Setelah memahami permasalahan keuangan yang muncul melalui hasil analisis, perusahaan dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat agar kinerja keuangan dapat ditingkatkan dan tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efektif.

Dengan melalui tahapan tersebut, pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan proyeksi yang menyeluruh mengenai kondisi organisasi. Proses ini bukan hanya sebatas menilai baik atau buruknya kinerja, tetapi juga menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan finansial di masa mendatang. Dalam konteks analisis ini, pengukuran kinerja keuangan sangat relevan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

2. Rasio Keuangan

a. Pengertian Rasio Keuangan

Destiani & Hendriyani (2021), mengungkapkan analisis rasio keuangan ialah teknik membandingkan angka-angka yang tersaji dalam laporan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai posisi dan kondisi keuangan instansi dalam periode tertentu. Sementara itu, Indah & Tyas (2020) menjelaskan bahwa rasio keuangan ialah angka yang didapatkan dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki keterkaitan yang relevan. Perbandingan tersebut dapat diterapkan baik antarpos dalam satu laporan keuangan maupun antarpos yang terdapat pada laporan yang berbeda.

Seorang analis keuangan membutuhkan sejumlah tolok ukur atau standar untuk mengevaluasi kesehatan dan kinerja keuangan suatu instansi. Salah satu tolok ukur yang paling umum digunakan adalah rasio keuangan. Temuan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan sangat penting, karena rasio keuangan merepresentasikan hubungan antara berbagai akun keuangan. Melalui analisis rasio keuangan, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan, sehingga memudahkan dalam meringkas hubungan-hubungan penting yang terkandung dalam data keuangan (Lase et al. 2022).

Menurut Noordiatmoko (2020), rasio keuangan ialah perbandingan antara berbagai angka dalam laporan yang dihitung dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya, baik dalam satu laporan maupun antarpos laporan yang berbeda. Sejalan dengan itu, Maritza et al. (2022) juga mengungkapkan

bahwasanya rasio keuangan ialah indeks yang mengaitkan dua angka akuntansi melalui proses pembagian, yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan serta kinerja perusahaan, sekaligus mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan.

Berlandasan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dengan membandingkan dua angka akuntansi yang relevan, sehingga dapat diketahui sifat hubungan di antara keduanya serta kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

b. Jenis – Jenis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan diterapkan dengan menghitung berbagai rasio yang diimplementasikan untuk proksikan kinerja dan kondisi finansial instansi. Secara umum, jenis-jenis rasio keuangan yang sering terapkan meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

1) Rasio Likuiditas

Menurut Palupi et al., (2023), rasio likuiditas ialah kompetensi suatu instansi dalam mencukupi segala kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Sejalan dengan itu, Hastiwi et al., (2022) mengungkapkan bahwa rasio ini mengukur kompetensi perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dengan kata lain, rasio ini memproyeksikan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai jadwal batas waktu yang telah ditentukan. Rasio likuiditas umumnya diukur menggunakan beberapa indikator, antara lain *current ratio* (rasio lancar), *quick ratio* (rasio cepat), dan *cash ratio* (rasio kas).

2) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk proksikan tingkat efektivitas instansi dalam optimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, terutama aset. Rasio ini memproyeksikan seberapa efisien instansi mengelola aset dalam memperoleh penjualan maupun pendapatan (Rahmanda et al. 2024). Contoh rasio aktivitas meliputi *inventory turnover*, *receivable turnover*, serta *total asset turnover*. Semakin tinggi rasio aktivitas, maka semakin baik pula kinerja instansi dalam menggunakan aset secara produktif.

3) Rasio Solvabilitas

Rasio ini sering disebut juga rasio *leverage* digunakan untuk proyeksikan sejauh mana aset instansi dibiayai oleh utang. Rasio ini juga mencerminkan kompetensi instansi dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Destiani and Hendriyani 2021). Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang baik dapat dipandang sehat secara finansial karena memiliki kemampuan melunasi utang jangka panjang. Beberapa ukuran yang sering digunakan dalam rasio solvabilitas adalah *debt to equity ratio* (DER), *debt to asset ratio* (DAR), serta *times interest earned* (TIE).

4) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas bertujuan untuk menilai kompetensi instansi dalam meraup laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini penting karena mencerminkan sejauh mana efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya untuk memperoleh keuntungan (Indah and Tyas 2020). Indikator umum dalam rasio profitabilitas meliputi *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *gross profit*

margin, dan *net profit margin*. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik kondisi instansi dalam menghasilkan laba dan memberikan pengembalian bagi pemegang saham.

Berlandaskan uraian di atas, dapat ditarik garis besar bahwasanya rasio keuangan memiliki beragam jenis dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Rasio likuiditas berfokus pada kompetensi instansi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio aktivitas mengukur efektivitas pengelolaan aset, rasio solvabilitas menilai kompetensi instansi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, sedangkan rasio profitabilitas mencerminkan tingkat kemampuan instansi dalam menghasilkan laba. Keempat jenis rasio tersebut saling melengkapi sehingga memberikan proyeksi secara menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi keuangan instansi. Dengan demikian, telaah yang mendalam mengenai masing-masing rasio sangat penting untuk mendukung proses analisis, evaluasi, serta pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

c. Tujuan dan Manfaat Rasio Keuangan

Setiap rasio keuangan memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja instansi dari berbagai sudut pandang. Analisis rasio keuangan tidak hanya diimplementasikan sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Shofwatun et al., (2021), tujuan dan manfaat analisis rasio ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat evaluasi kinerja dan prestasi instansi.

Rasio keuangan membantu dalam menilai keberhasilan perusahaan dalam mengelola aset, kewajiban, serta modal yang dimilikinya. Melalui perbandingan rasio keuangan dari periode ke periode, dapat diketahui sejauh mana perusahaan mengalami perkembangan atau penurunan kinerja. Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan apakah perusahaan telah mencapai target yang ditetapkan.

- 2) Memberikan dukungan bagi manajemen dalam menyusun perencanaan.

Manajemen perusahaan membutuhkan informasi yang akurat dan terukur untuk menyusun strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini berperan dalam memberikan proyeksi mengenai kekuatan dan kelemahan instansi sehingga manajemen dapat menetapkan kebijakan yang tepat, misalnya dalam pengendalian biaya, ekspansi usaha, maupun peningkatan efisiensi operasional.

- 3) Membantu menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Kondisi keuangan instansi mengungkapkan kompetensi instansi dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas. Melalui rasio keuangan, pihak manajemen dan pengguna laporan lainnya dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesehatan finansial perusahaan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur keberlanjutan usaha (*going concern*) perusahaan dalam jangka panjang.

- 4) Menjadi dasar bagi kreditor dalam menilai risiko pembayaran kredit.

Kreditor menggunakan informasi rasio keuangan untuk menilai sejauh mana instansi memiliki kemampuan membayar kewajiban finansialnya tepat waktu. Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas menjadi indikator penting dalam

menentukan tingkat risiko kredit. Dengan demikian, analisis rasio keuangan dapat meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dihadapi kreditor akibat gagal bayar.

5) Menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Selain manajemen dan kreditor, pihak-pihak lain seperti investor, pemerintah, maupun masyarakat juga dapat menggunakan informasi rasio keuangan. Bagi investor, rasio keuangan menjadi dasar dalam menilai prospek keuntungan dan risiko investasi. Pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi kebijakan ekonomi atau perpajakan, sedangkan masyarakat dapat menilai kontribusi perusahaan terhadap perekonomian. Dengan demikian, rasio keuangan berfungsi sebagai acuan penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan.

Berlandaskan uraian di atas, dapat ditarik garis besar bahwasanya analisis rasio keuangan memiliki peranan penting dalam menilai kinerja serta kondisi finansial perusahaan. Setiap rasio menyajikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selain itu, manfaat analisis rasio keuangan tidak hanya dirasakan oleh pihak internal, seperti manajemen dalam penyusunan strategi dan perencanaan, tetapi juga oleh pihak eksternal, seperti kreditor, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, penggunaan rasio keuangan menjadi salah satu instrumen yang esensial dalam proses evaluasi dan penentuan keputusan bisnis.

3. **Badan Layanan Umum (BLU)**

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) pada instansi Badan Layanan Umum (BLU) berfokus pada penyediaan layanan pembelajaran yang bersifat praktis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Aktivitas utama yang dilakukan mencakup perencanaan program diklat Berlandaskan kebutuhan kompetensi, penyusunan kurikulum berbasis industri, serta pelaksanaan proses pembelajaran yang mengombinasikan teori dan praktik. Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya mendapatkan materi di kelas, namun juga mengikuti kegiatan praktik di laboratorium, workshop, maupun simulasi untuk meningkatkan keterampilan teknis.

Selain itu, pelaksanaan diklat pada BLU juga melibatkan proses evaluasi dan sertifikasi kompetensi guna memastikan bahwa peserta memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dukungan fasilitas seperti peralatan praktik, teknologi pembelajaran, serta kerja sama dengan mitra industri menjadi bagian penting dalam menunjang efektivitas pelatihan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLU memungkinkan penyelenggaraan diklat dilakukan secara lebih responsif, misalnya dalam pengembangan program pelatihan baru, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta penyesuaian metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun menjalankan aktivitas diklat yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan teknis operasional, praktik penggunaan peralatan perkeretaapian, simulasi sistem transportasi rel, serta pembinaan disiplin dan kesiapan kerja peserta. Dengan

demikian, aktivitas diklat yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi pada pembelajaran akademik, tetapi juga pada pembentukan keterampilan profesional yang relevan dengan kebutuhan industri transportasi perkeretaapian.

4. Standard Interpretasi Analisis

Penilaian kinerja keuangan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan BLU. Rasio-rasio keuangan yang digunakan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis secara statistik, melainkan sebagai alat bantu analisis untuk menyajikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai efektivitas, efisiensi, likuiditas, dan tingkat kemandirian keuangan BLU PPI Madiun (Kementrian Keuangan Indonesia 2021). Berikut ini beberapa analisis kinerja keuangan yang digunakan adalah:

a. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas mencerminkan kemampuan BLU dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengelola aset lancar yang tersedia. Penilaian likuiditas penting untuk mengetahui sejauh mana BLU dapat menjaga kestabilan keuangan dan memastikan kelancaran operasional tanpa mengalami kesulitan kas. Dalam penelitian ini, aspek likuiditas diukur menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio lancar dan rasio optimalisasi kas, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman PER-11/PB/2021. Kedua rasio tersebut memberikan gambaran tentang kemampuan BLU dalam mengelola aset lancar dan kas secara efektif untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan (Kementrian Keuangan Indonesia 2021). Berikut ini ialah rumus perhitungan rasio yang digunakan meliputi:

1) Rasio Kas (RK)

Adapun cara menentukan penilaian dari hasil perhitungan proksi pengukuran rasio kas (RK) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat likuiditas pada BLU.

Tabel 2. 1 Skor Rasio Kas

No	Skor	Kriteria
1	$0 < RK \leq 0,5$	Sangat Rendah
2	$0,5 < RK \leq 0,8$	Rendah
3	$0,8 < RK \leq 1$	Cukup
4	$RK > 1$	Tinggi

Sumber : (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022)

Berlandaskan rentang nilai yang telah ditentukan pada tabel 2.1 dapat diuraikan seperti ini:

- a) Sangat Rendah ($0 < RK \leq 0,5$): Rasio kas pada level ini mengindikasikan likuiditas yang sangat terbatas. BLU perlu mewaspadaai penambahan utang jangka pendek, piutang operasional yang macet, serta pengeluaran kas untuk biaya operasional yang tidak perlu.
- b) Rendah ($0,5 < RK \leq 0,8$): Rasio kas yang rendah menunjukkan likuiditas terbatas. BLU perlu memperhatikan piutang operasional dan melakukan penghematan pengeluaran kas yang tidak esensial.
- c) Cukup ($0,8 < RK < 1$): Tingkat likuiditas pada kategori cukup menunjukkan BLU masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, namun tetap harus mengontrol pengeluaran kas yang tidak perlu.
- d) Tinggi ($RK > 1$): Rasio kas tinggi menandakan BLU memiliki likuiditas lebih dari cukup. BLU tetap harus memastikan pengelolaan kas dilakukan secara terotorisasi dan efisien agar kas tidak idle secara berlebihan.

Dengan demikian, pemantauan rasio kas membantu BLU dalam menilai kondisi likuiditas dan mengambil langkah mitigasi yang tepat terhadap risiko terkait kas, baik untuk operasional maupun pengelolaan piutang dan utang jangka pendek.

2) Rasio Lancar (RL)

Adapun cara menentukan penilaian dari hasil perhitungan proksi pengukuran rasio lancar (RL) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat likuiditas pada BLU.

Tabel 2. 2 Skor Rasio Lancar

No	Skor	Kriteria
1	$0 > RL < 1$	Rendah
2	$1 \leq RL < 2$	Cukup
3	$RL \geq 2$	Tinggi

Sumber : (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022)

Berlandaskan rentang nilai yang telah ditentukan pada tabel 2.2. dapat diuraikan seperti ini:

- a) Rendah ($0 < RL < 1$): Rasio lancar pada level ini menunjukkan likuiditas yang kurang memadai. BLU perlu mewaspadai penambahan utang jangka pendek, piutang operasional yang macet, serta pengeluaran kas untuk biaya operasional yang tidak perlu.
- b) Cukup ($1 \leq RL < 2$): Tingkat likuiditas pada kategori cukup menunjukkan BLU masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun tetap perlu memperhatikan pengeluaran kas yang tidak esensial dan pengelolaan piutang operasional.
- c) Tinggi ($RL \geq 2$): Rasio lancar tinggi menandakan BLU memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lebih

mudah. Meskipun demikian, BLU tetap harus memastikan pengelolaan kas dilakukan secara efisien agar tidak terjadi kas idle yang berlebihan.

Dengan demikian, pemantauan rasio lancar membantu BLU dalam menilai kondisi likuiditas dan mengambil langkah mitigasi yang tepat terhadap risiko terkait kas, piutang, maupun utang jangka pendek.

3) Perhitungan Periode Penagihan (PPP)

Adapun cara menentukan penilaian dari hasil perhitungan proksi pengukuran periode penagihan (PPP) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat likuiditas pada BLU.

Tabel 2. 3 Skor Periode Penagihan Piutang (PPP)

No	Skor	Kriteria
1	$PPP \leq 60$	Cepat
2	$60 < PPP \leq 100$	Sedang
3	$PPP > 100$	Lambat

Sumber : (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022)

Berlandaskan rentang nilai yang telah ditentukan pada tabel 2.3 dapat diuraikan seperti ini:

- a) Cepat ($PPP \leq 60$ hari): Periode penagihan piutang pada level ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam penerimaan kas. BLU perlu mewaspadai pengakuan pendapatan dan piutang yang belum tercatat agar tetap tercatat secara akurat.
- b) Sedang ($60 < PPP \leq 100$ hari): Tingkat efisiensi piutang kategori sedang menunjukkan BLU masih mampu menagih piutang dengan relatif baik, namun perlu memperhatikan peningkatan pengakuan pendapatan dan piutang tak tertagih yang kualitasnya memburuk, serta memastikan pengelolaan dan penagihan piutang berjalan efektif.

- c) Lambat ($PPP > 100$ hari): Periode penagihan yang lambat menandakan efisiensi rendah, dengan risiko peningkatan piutang tak tertagih dan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai substansi ekonominya. BLU harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan, pencatatan, dan penagihan piutang agar likuiditas tetap terjaga.

Dengan demikian, pemantauan periode penagihan piutang membantu BLU dalam menilai efisiensi penerimaan kas dan mengambil langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih dan memastikan ketersediaan kas yang memadai.

b. Aspek Kinerja Layanan

Analisis rasio keuangan BLU pada aspek kinerja layanan bertujuan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam menghasilkan pendapatan melalui efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Rasio-rasio pada aspek ini menggambarkan sejauh mana BLU mampu menjalankan prinsip produktivitas, kemandirian, dan keberlanjutan dalam pengelolaan layanannya. Melalui analisis ini, dapat diketahui apakah pendapatan yang diperoleh sebanding dengan beban operasional yang dikeluarkan serta bagaimana kontribusi sumber daya yang dimiliki terhadap kinerja keuangan lembaga.

Adapun rasio keuangan yang diterapkan untuk proyeksikan aspek kinerja layanan terdiri atas: Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO), Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio Imbal Jasa Layanan, Rasio Imbal Ekuitas, dan Rasio Belanja Pegawai (Kementrian Keuangan Indonesia 2021).

1) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Belanja Operasional (POBO)

Adapun cara menentukan penilaian dari hasil perhitungan proksi pengukuran rasio pendapatan operasional terhadap belanja operasional (POBO) yang dapat digunakan untuk menilai aspek kinerja layanan pada BLU.

Tabel 2. 4 Skor Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO)

No	Skor	Kriteria
1	$0 < \text{POBO} \leq 0,70$	Rendah
2	$0,70 \leq \text{POBO} < 1$	Cukup
3	$\text{POBO} \geq 1$	Tinggi

Sumber : (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022)

Berlandaskan rentang nilai yang telah ditentukan pada tabel 2.4 dapat diuraikan seperti ini:

- a) Rendah ($0 < \text{POBO} \leq 0,70$): Rasio POBO rendah menunjukkan kemandirian BLU yang terbatas. BLU perlu melakukan intensifikasi pendapatan layanan operasional, ekstensifikasi pendapatan non-operasional seperti optimalisasi aset, serta masih bergantung pada alokasi dana dari rupiah murni.
- b) Cukup ($0,70 \leq \text{POBO} < 1$): Tingkat kemandirian kategori cukup menunjukkan BLU mulai mampu mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana dari rupiah murni. BLU tetap perlu meningkatkan pendapatan operasional dan non-operasional secara optimal.
- c) Tinggi ($\text{POBO} \geq 1$): Rasio POBO tinggi menunjukkan BLU memiliki kemandirian yang baik dan mampu menutupi beban operasional dari pendapatan sendiri. BLU dapat mengelola surplus pendapatan untuk investasi berisiko rendah, seperti deposito jangka pendek, untuk menjaga likuiditas dan efisiensi keuangan.

Dengan demikian, pemantauan rasio POBO membantu BLU dalam menilai kinerja keuangan dan mengambil langkah mitigasi yang tepat guna meningkatkan kemandirian serta optimalisasi pendapatan.

2) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Adapun cara menentukan penilaian dari hasil perhitungan proksi pengukuran BOPO yang dapat digunakan untuk menilai aspek kinerja layanan pada BLU.

Tabel 2. 5 Skor Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

No	Skor	Kriteria
1	$0 < \text{BOPO} \leq 0,70$	Rendah
2	$0,70 \leq \text{BOPO} < 1$	Cukup
3	$\text{POBO} \geq 1$	Tinggi

Sumber : (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022)

Berlandaskan rentang nilai yang telah ditentukan pada tabel 2.5 dapat diuraikan seperti ini:

- Rendah ($0 < \text{BOPO} \leq 0,70$): Rasio BOPO yang rendah menunjukkan tingkat efisiensi keuangan BLU yang baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa beban operasional yang dikeluarkan relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan, sehingga BLU mampu mengelola operasionalnya secara efektif dan efisien.
- Cukup ($0,70 \leq \text{BOPO} < 1$): Rasio BOPO dalam kategori cukup menunjukkan bahwa pengelolaan beban operasional sudah seimbang dengan pendapatan operasional yang diperoleh. Namun, efisiensi masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya dan pengendalian biaya agar kinerja keuangan semakin efisien.

- c) Tinggi ($\text{BOPO} \geq 1$): Rasio BOPO yang tinggi menandakan efisiensi pengelolaan keuangan BLU masih rendah. Hal ini memproyeksikan bahwasanya beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan operasional yang diperoleh, sehingga BLU perlu melakukan evaluasi terhadap struktur biaya dan strategi peningkatan pendapatan layanan agar tidak bergantung pada dukungan dana tambahan.

Dengan demikian, pemantauan rasio BOPO membantu BLU PPI Madiun dalam menilai efisiensi pengelolaan keuangan dan memastikan keberlanjutan operasional secara mandiri.

3) Rasio Imbal Jasa Layanan

Rasio Imbal Jasa Layanan (IJL) memberikan gambaran mengenai kemampuan BLU PPI Madiun dalam menghasilkan surplus dari kegiatan operasional layanan yang diselenggarakan. Rasio ini diterapkan untuk proksikan seberapa besar proporsi pendapatan operasional yang berhasil dikonversi menjadi surplus, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan serta beban operasional. Semakin tinggi nilai rasio Imbal Jasa Layanan (IJL), maka semakin baik kemampuan BLU dalam mengelola keuangan dan menciptakan nilai tambah dari kegiatan layanannya. Sebaliknya, nilai rasio IJL yang rendah mengindikasikan rendahnya kemampuan BLU dalam menciptakan surplus, sehingga diperlukan upaya peningkatan efisiensi dan diversifikasi sumber pendapatan.

Dalam pengukuran rasio Imbal Jasa Layanan (IJL), analisis dilakukan berlandaskan hasil per tahun, sehingga tinggi rendahnya rasio dinilai dengan

membandingkan nilai IJL setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan BLU untuk melihat tren kinerja operasional dari waktu ke waktu, apakah surplus yang dihasilkan meningkat, menurun, atau tetap defisit.

4) Rasio Imbalan Ekuitas

Rasio Imbalan Ekuitas memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas BLU PPI Madiun dalam mengelola modal yang tersedia untuk memperoleh surplus dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini digunakan untuk menilai kompetensi manajemen dalam mengalokasikan sumber daya ekuitas secara efisien sehingga dapat memberikan pengembalian yang optimal bagi keberlanjutan lembaga. Semakin tinggi nilai rasio rasio imbalan ekuitas, semakin baik kinerja keuangan BLU, karena memproyeksikan bahwa ekuitas telah digunakan secara produktif untuk menghasilkan surplus. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah atau negatif mengindikasikan bahwa modal belum dimanfaatkan secara optimal dan masih diperlukan peningkatan efisiensi serta optimalisasi pendapatan operasional.

Dalam konteks pengukuran rasio imbalan ekuitas analisis dilakukan berlandaskan hasil per tahun, sehingga perubahan nilainya dapat menggambarkan tren efektivitas pengelolaan modal dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu BLU dalam menilai apakah pengelolaan ekuitasnya telah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya atau justru mengalami penurunan yang memerlukan tindakan perbaikan.

5) Rasio Belanja Pegawai

Rasio Belanja Pegawai memberikan gambaran mengenai kemampuan BLU PPI Madiun dalam mengendalikan pengeluaran pegawai agar tetap proporsional

terhadap pendapatan yang dihasilkan. Rasio ini diterapkan untuk menilai tingkat efisiensi BLU dalam mengalokasikan sumber daya manusia terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin kecil nilai rasio belanja pegawai, semakin efisien BLU dalam menjalankan layanan publik, karena menunjukkan bahwa pendapatan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk kegiatan produktif lainnya. Sebaliknya, rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk membiayai pegawai, sehingga ruang fiskal BLU untuk kegiatan pengembangan layanan menjadi terbatas. Dalam pengukurannya, analisis Rasio Belanja Pegawai dilakukan berlandaskan hasil per tahun, dengan membandingkan nilai rasio dari tahun ke tahun untuk menilai tren efisiensi pengelolaan belanja pegawai.

c. Aspek Pengembangan Dana

Analisis rasio keuangan BLU pada aspek pengembangan dana bertujuan untuk mencerminkan kompetensi BLU dalam mengelola serta memanfaatkan kas menganggur (*idle cash*) melalui kegiatan investasi yang produktif guna meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Melalui aspek ini, dapat dinilai sejauh mana BLU mampu mengoptimalkan dana yang tidak segera digunakan untuk operasional agar memberikan imbal hasil tambahan yang mendukung keberlanjutan keuangan lembaga.

Aspek pengembangan dana mencakup dua rasio utama, yaitu Rasio Pengembangan Kas dan Rasio Pengembalian Investasi. Dengan demikian, analisis aspek pengembangan dana memberikan gambaran mengenai kapasitas BLU PPI Madiun dalam mengelola sumber daya keuangan secara strategis, tidak hanya untuk menjaga likuiditas, tetapi juga untuk meningkatkan nilai manfaat kas melalui

kegiatan investasi yang aman, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kementrian Keuangan Indonesia 2021).

1) Rasio Pengembangan Kas

Adapun cara menentukan penilaian dari hasil perhitungan proksi pengukuran rasio pengembangan kas yang dapat digunakan untuk menilai aspek pengembangan dana pada BLU sebagai berikut ini:

Tabel 2. 6 Skor Rasio Pengembangan Kas

No	Tingkat Disparita dari Nilai Rata-rata Yield Deposito Bank BUMN	Kriteria
1	$\leq 0,5\%$	Rendah
2	$< 0,5\%$ s.d 1%	Cukup
3	$< 1\%$ s.d 5%	Tinggi

Sumber : (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022)

Berlandasan rentang nilai yang telah ditentukan pada tabel 2.6 dapat diuraikan seperti ini:

- Disparitas $\leq 0,5\%$ menunjukkan pengelolaan kas yang relatif efisien, di mana hasil investasi BLU sebanding dengan rata-rata yield bank BUMN. Namun demikian, BLU tetap perlu memantau suku bunga dan tingkat bagi hasil agar tidak terjadi penurunan return.
- Disparitas antara $0,5\%$ hingga 1% mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi penempatan dana, terutama pada bank yang memberikan yield di bawah rata-rata pasar. Optimalisasi pemilihan bank mitra investasi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan dana.
- Disparitas antara 1% hingga 5% menunjukkan potensi ketidakefisienan dalam pemilihan bank penempatan deposito. BLU perlu mewaspadai

mekanisme seleksi (beauty contest) agar penempatan dana benar-benar mempertimbangkan tingkat imbal hasil terbaik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan..

Dengan demikian, pemantauan rasio pengembangan kas membantu BLU PPI Madiun dalam menilai efektivitas pengelolaan kas dan strategi investasi jangka pendek. Melalui evaluasi terhadap disparitas *yield*, BLU dapat memastikan bahwa dana kas yang dimiliki tidak menganggur, melainkan memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan dan kinerja keuangan lembaga.

2) Rasio Pengembalian Invetasi

Rasio pengembalian investasi memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas BLU PPI Madiun dalam mengelola dana yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui kegiatan investasi. Rasio ini mencerminkan kemampuan lembaga dalam memanfaatkan kas atau dana bergulir secara optimal guna memperoleh tingkat pengembalian yang menguntungkan. Selain itu, rasio ini juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana strategi investasi yang diterapkan mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan serta keberlanjutan operasional BLU secara efisien dan produktif.

d. Aspek Pengelolaan Aset

Analisis ini bertujuan untuk proyeksikan tingkat efisiensi BLU dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional dan memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui analisis ini, dapat ditelaah sejauh mana aset yang dikelola telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung produktivitas layanan serta meningkatkan kinerja

keuangan lembaga. Aspek ini menjadi penting karena pengelolaan aset yang efektif tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga menunjukkan kompetensi BLU dalam menjaga keberlanjutan dan nilai ekonomi dari aset yang dimiliki. Aspek pengelolaan aset ini terdiri dari tiga jenis rasio pengukuran, seperti rasio perputaran aset tetap, rasio imbalan atas aset tetap, dan rasio optimalisasi aset. (Kementrian Keuangan Indonesia 2021).

1) Rasio Perputaran Aset Tetap

Dalam pengukuran Rasio Perputaran Aset Tetap, analisis dilakukan berlandaskan hasil per tahun untuk melihat tren efektivitas pemanfaatan aset tetap dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memungkinkan BLU untuk menilai apakah produktivitas aset tetap mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil pada periode tertentu. Nilai rasio yang meningkat dari tahun ke tahun menyajikan adanya peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan operasional, sedangkan penurunan rasio dapat mengindikasikan adanya aset yang kurang produktif, kelebihan kapasitas, atau penurunan kinerja operasional. Oleh karena itu, hasil analisis tahunan rasio ini menjadi dasar penting bagi BLU PPI Madiun dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset serta menentukan strategi optimalisasi penggunaan aset di masa mendatang (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2022).

2) Rasio Imbalan Atas Aset Tetap

Dalam analisisnya, rasio imbalan atas aset tetap dilihat berlandaskan hasil per tahun untuk menilai tren kinerja pemanfaatan aset dari waktu ke waktu. Nilai rasio yang meningkat dari tahun ke tahun mengungkapkan adanya peningkatan

efektivitas dalam pengelolaan aset tetap, sedangkan penurunan rasio dapat mengindikasikan aset yang kurang produktif atau peningkatan beban operasional yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

3) Rasio Optimalisasi Aset

Rasio optimalisasi aset diterapkan untuk menganalisis tingkat produktivitas aset tetap maupun aset lainnya yang dimiliki BLU dalam menghasilkan pendapatan operasional (PNBP). Rasio ini menggambarkan sejauh mana aset yang dimiliki, termasuk aset idle (tidak produktif), dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan layanan publik dan meningkatkan pendapatan lembaga.

Dalam analisisnya, rasio optimalisasi aset dievaluasi berlandaskan hasil per tahun untuk melihat perkembangan efektivitas pengelolaan aset dari waktu ke waktu. Peningkatan nilai rasio dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam pemanfaatan aset dan peningkatan produktivitas lembaga, sedangkan penurunan nilai rasio mencerminkan perlunya optimalisasi kembali strategi pengelolaan aset agar dapat mendukung peningkatan PNBP dan kinerja layanan secara keseluruhan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah kajian yang memuat temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Bagian ini disusun untuk menyajikan gambaran mengenai temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada lembaga pendidikan atau Badan Layanan Umum, serta sebagai dasar perbandingan dengan teori-teori yang telah dikaji pada bab tinjauan pustaka. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan

penelitian, persamaan maupun perbedaan temuan, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang jelas dan memperkuat landasan ilmiah penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat disajikan seperti ini:

Menurut temuan Laju dkk (2025), penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan strategi pengembangan media promosi layanan diklat melalui pemanfaatan Podcast sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi Badan Layanan Umum (BLU) pada Politeknik Pelayaran Malahayati. Temuan ini memproyeksikan bahwasanya transformasi layanan diklat melalui pengembangan media promosi berbasis Podcast mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, kepemimpinan transformasional yang berfokus pada penciptaan perubahan positif serta motivasi anggota organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi ini. Penyediaan ruang Podcast juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan metode pembelajaran yang lebih modern dan interaktif.

Menurut Zusnita Hermala dan Virma Septiani (2025), yang bertujuan menganalisis strategi pemasaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Penerbangan Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan yang berdampak pada jumlah taruna yang mendaftar, sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan. Temuan ini memproyeksikan bahwasanya strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh Politeknik Penerbangan Palembang berhasil

meningkatkan mutu pendidikan karena indikator keberhasilan strategi tersebut tercapai. Upaya promosi yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan secara tidak langsung dengan memanfaatkan media cetak serta elektronik sebagai sarana komunikasi publik. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan promosi, tetapi juga memperkuat citra institusi sebagai lembaga pendidikan vokasi yang kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aryada dkk (2025), yang menganalisis implementasi manajemen Badan Layanan Umum (BLU) pada bidang akademik di Politeknik Negeri Pontianak dalam rangka memantapkan kualitas layanan pendidikan. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya pelaksanaan manajemen BLU di Politeknik Negeri Pontianak masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kualitas tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang belum optimal, serta pengelolaan sumber daya keuangan yang belum sepenuhnya mandiri. Selain itu, terdapat program layanan akademik yang belum sepenuhnya diimplementasikan akibat masa transisi dari satuan kerja biasa ke pola BLU. Meskipun demikian, dari sisi penerapan layanan kepada mahasiswa dan kepuasan publik, hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi BLU di bidang akademik memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pemahaman terhadap konsep BLU, serta optimalisasi tata kelola keuangan agar tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.

Menurut Syahromi dan Cheisviyanny (2020), yang menganalisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penerapan PK BLU meningkatkan kinerja keuangan universitas meskipun rasio keuangan belum sepenuhnya stabil, serta indeks kepuasan publik mencapai 70,02. Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus keduanya pada evaluasi kinerja keuangan BLU, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menekankan dampak PK BLU terhadap fleksibilitas pengelolaan keuangan dan infrastruktur pendidikan, sementara penelitian saat ini berfokus pada kinerja keuangan BLU di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan pendekatan analisis rasio keuangan dan efektivitas pengelolaan dana pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Menurut Pradita Galih dkk (2023), yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan BLU Universitas Brawijaya selama periode 2017–2020 dari aspek likuiditas dan kinerja layanan. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya rasio likuiditas BLU UB termasuk tinggi, periode penagihan piutang tergolong cepat, dan kinerja layanan memiliki kemandirian tinggi sehingga operasional berjalan lebih efisien. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah keduanya menilai kinerja keuangan Badan Layanan Umum melalui rasio keuangan, sementara perbedaannya terletak pada konteks lembaga yang diteliti: Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi negeri secara umum dibandingkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

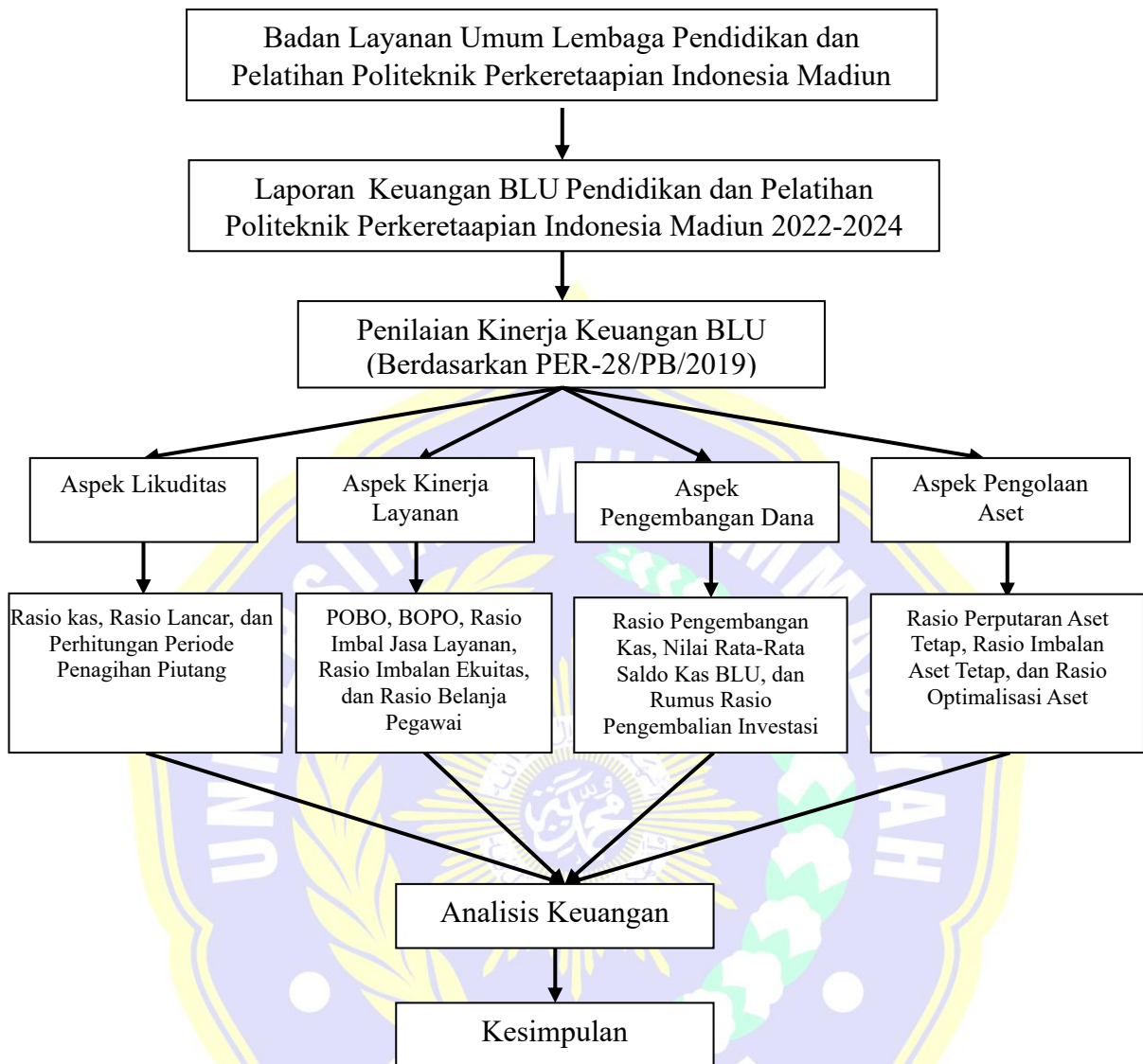
Menurut Hanimalkan dan Abdul Quddus (2024), yang bertujuan untuk menganalisis implementasi BLU di Universitas Islam Negeri Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan dimulai pada tahun 2018, sejalan dengan kebijakan lembaga pemerintah lainnya. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas penerapan BLU di institusi pendidikan, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menekankan penerapan BLU secara umum dan fleksibilitas manajemen, sementara penelitian saat ini menekankan evaluasi kinerja keuangan dengan rasio keuangan BLU.

Berlandaskan uraian penelitian terdahulu, dapat ditarik garis besar bahwasanya penerapan pola pengelolaan keuangan BLU memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan operasional lembaga dalam bidang pendidikan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, peningkatan akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun, setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda, mulai dari evaluasi rasio keuangan, implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan, hingga tantangan operasional. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk penelitian lebih lanjut, khususnya pada BLU yang berada di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, seperti PPI Madiun untuk menganalisis kinerja keuangan secara komprehensif melalui pendekatan rasio keuangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana BLU.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini disusun untuk memproyeksikan alur logis antara landasan teori, variabel yang digunakan, serta tujuan penelitian (Ulum et al. 2021). Melalui kerangka berpikir, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana analisis rasio keuangan dapat diimplementasikan untuk menilai kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kinerja keuangan dipandang sebagai indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan sumber daya, khususnya dalam aspek likuiditas dan kinerja layanan. Dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pengelolaan keuangan mampu mendukung stabilitas, efisiensi operasional, serta keberlanjutan layanan pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Kerangka berpikir ini menjadi dasar konseptual yang menghubungkan teori, metode analisis, serta hasil yang diharapkan sehingga dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademis.

Adapun gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat disajikan sebagai berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Sumber: Data Peneliti 2026